LAMPIRAN ………..

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR …… TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN SALE**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

**1.1 Latar Belakang**

Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja apabila diartikan berdasarkan frasa yakni terdiri dari kata rencana dengan definisi rancangan, konsep maupun laporan pemberitaan (KBBI, 2008:1194), sedangkan kerja dapat dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu (KBBI, 2008:703). Oleh karena itu rencana kerja juga dapat diartikan sebagai suatu rancangan terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan. Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan sebagai upaya insepsi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman kepada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja sebagaimana pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mengacu pada surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran rancangan awal RKPD.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus Menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat di selesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

* + 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

* + 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
		5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
		6. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
1. **1.3 Maksud dan Tujuan**

**1.3.1 Maksud**

Penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2022 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang selam satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

**1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun 2022 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 sebagai bahan

 penyusunan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2022;

3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sale Kabupaten Rembang berserta peluang dan tantangan yang dihadapi;

4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Ranwal Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja,maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1).

BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang tujuan,sasaran dan kegiatan dari penyusunana Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan .

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SALE

Bab ini memuat tentang Pendanaan Kecamatan Sale

BAB V. PENUTUP

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2020**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2019 dan 2020. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

|  |
| --- |
| Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  |
| Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 |
| Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Sale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program ( outcomes)/ Kegiatan ( Output) | Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan |
|
| Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( %) |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|   |   |   |   | Urusan Umum |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Kacamatan Sale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum** |  | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |   |   |
| **Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur**  |  | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |   |   |
| **Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian** |  | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |   |   |
| **Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan** |  | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran |   | 90 | 100 | 89,31 | 89,31 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD Yang dikelola dengan Baik |   | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | Jumlah dokumen Manajemen Kepegawaian Yang dikelola Dengan baik |   | 90 | 100 | 91,34 | 91,34 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan | Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Dengan Kualitas Baik |   | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%** |  | **65** | 65 | 65 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun |   | 65 | 100 | 100 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Dokumen laporan kinerja yang disusun |   | 65 | 100 | 100 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | **Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%** |   | **90** | 90 | 90 | 100 | 95 |   |   |
|   |   |   |   | Pengelolaan keterbukaan informasi public | Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik |   | 90 | 100 | 76,92 | 76,92 |   |   |   |
|   | **Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat** | **Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan** |   | **6** | 6 | 6 | 100 | 7 |   |   |
| **Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa** |   | **6** | 6 | 6 | 100 | 7 |   |   |
| **Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat** |   | **6** | 6 | 6 | 100 | 7 |   |   |
| **Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban** |   | **6** | 6 | 6 | 100 | 7 |   |   |
|   |   |   |   | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeriintahan Desa/Kelurahan | Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi |   | **6** | 100 | 72,89 | 72,89 | 7 |   |   |
|   |   |   |   | Persentase Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang lunas bayar PBB |
|   |   |   |   | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola |   | **6** | 100 | 99,56 | 99,56 | 7 |   |   |
|   |   |   |   | Persentase Penetapan APBDesa Tepat waktu |
|   |   |   |   | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat desa yang Aktif |   | **6** | 100 | 89,33 | 89,33 | 7 |   |   |
|   |   |   |   | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase Penyelesaian Permasalahan K3 ( Ketertiban , Ketentraman dan Keindahan ) |   | **6** | 100 | 91,34 | 91,34 | 7 |   |   |

Adapun program yang ditambahkan sebagai upaya sinkronisasi Renja tahun 2020 dengan Renstra Kecamatan Sale tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Sale**

**Kabupaten Rembang Berdasarkan Indikator,sasaran renstra Tahun
 2016 -2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | %Capaian  | % Capaian  | % Capaian  | RPJMD |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Target akhir 2021 | % Capaian 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
| Meningkatkankualitas pelayanan Publik Kecamatan Sale | IKM Kecamatan Sale | 90 | Na | 81 | 86,36 | Na | 85% | 79 |
| MeningkatkanKinerja dan kapasitas pemerintah Desa | % Desa, maju, mandiri | 4% | 13,33 | 333,25 | 0 | 0 | 4% | 333,25 |
| Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.25 jt | 4% | 86,66 | 2,166 | 7 | **6** | 4% | 2,166 |

Berdasarkan tabel 2.2, maka dapat dilihat bahwa :

1. **Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama** : **Meningkatnya IKM.**

IKM Kecamatan Sale berjalan mulai tahun 2019 dengan capaian 81 %,dan untuk tahun 2020 dengan capaian 79,88% , mengalami peurunana karena kunjungan masyarakat ke Kecamatan berkurang.

**b.Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua” Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa”**

Sasaran strategis kedua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ini, dengan indicator persentase desa maju Mandiri dengan target 4 % dengan realisasi 13,33 % dari 15 desa dengan kriteria 2 desa maju adapun data desa klasifikasi maju desa kecamatan Sale tahun 2020 adalah sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

**Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintah Desa Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **Mandiri** | **Maju** | **Berkembang** |
| 1 | Bancang | - | - | V |
| 2 | Ngajaran | - | - | V |
| 3 | Sale | - | V | - |
| 4 | Sumbermulyo | - | - | V |
| 5 | Tahunan | - | - | V |
| 6 | Tengger | - | - | V |
| 7 | Wonokerto | - | - | V |
| 8 | Gading | - | - | V |
| 9 | Jinanten | - | - | V |
| 10 | Joho | - | - | V |
| 11 | Mrayun | - | V | - |
| 12 | Pakis | - | - | V |
| 13 | Rendeng | - | - | V |
| 14 | Ukir | - | - | V |
| 15 | Bitingan | - | - | V |
|  | **JUMLAH** | **0** | **2** | **13** |

Untuk indikator sasaran kedua yaitu persentase desa maju sebesar 4 % tercapai 13,33 % dengan kriteria sangat berhasil Perhitungan dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

 Perhitungan Realisasi Tahun 2020 :

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Desa Maju  | X 100 % |
| Jumlah Desa Yang Ada |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 Desa | X 100 % = 13,33 % |
| 15 Desa |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 13,33 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2020, maka dilaksanakan perhitungan sebagai berikut :

 Perhitungan Persentase Capaian KinerjaTahun 2020:

|  |  |
| --- | --- |
| Presentasi Realisasi (5) | X 100 % |
|  Presentasi Target Capaian (4) |

|  |  |
| --- | --- |
| 13,33 | X 100 % = 333,25 % |
| 4 |

**c.Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa”**

Sasaran strategis Kec Sale Kab Rembang dengan indikator Persentasi Desa Dengan Swadaya masyarakat lebih dari 25 jt tercapai 86,66 % dari 13 desa denga target 4 %

Berdasarkan tabel 2.2. diatas, dapat kita lihat target capaian untuk sasaran strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2020 adalah sebesar 86,66 %. Untuk mengetahui realisasi capaian pada Tahun 2020, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Desa yang nilai Swadaya lebih dari 25 Jt |  X 100 % |
| Jumlah Desa |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | X 100 % = 86,66 % |
| 15 |

 Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 86,66%. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2020, maka dilaksanakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Persentase Capaian KinerjaTahun 2020 :

|  |  |
| --- | --- |
| Presentasi Realisasi (5) | X 100 % |
| Presentasi Target Capaian (4) |

|  |  |
| --- | --- |
|  86.66 | X 100 % = 2,166 % |
| 4 |

**d.Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis Keempat “Meningkatkan Kinerja dan kapasitas Desa”**

Sasaran strategis keempat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ini, dengan indikator persentase Desa yang lunas bayar PBB dengan target 100 % dengan realisasi 97,16% dari yang lunas bayar hanya 15 desa

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah desa yang lunas bayar PBB | X 100 % |
| Jumlah desa yang ada |

|  |  |
| --- | --- |
| 15 desa | X 100 % = 97,16% |
|  15 desa |

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan hasil realisasi untuk capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 97,16 %. Selanjutnya untuk melihat persentase capaian kinerja pada tahun 2020 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan capaian Kinerja Tahun 2020 :

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi | X 100 % |
| Target Capaian |

|  |  |
| --- | --- |
| 97,16  | X 100 % = 97,16% |
| 100 |

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparat Kecamatan Sale untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

* 1. **Penentu Isu-Isu Strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Rendahnya partispasi masyarakat dalam pembangunan desa.

**2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sale**

Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan,maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Sale harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat,sebagai perencana,pelaksana dan evaluasi secara independen,obyektif dan proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan public meningkatkan kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1. **Camat**
2. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

1. Fungsi :
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
10. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. **Sekretaris kecamatan**
12. Tugas pokok

Perencanaan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama , kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan

1. Fungsi
2. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan ;
3. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat. Arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata dengan tugas laksana di lingkungan kecamatan ;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian interen pemerintah ( SPIP ) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. **Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**
11. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan di lingkungan kecamatan.

1. **Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan**
2. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaa, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

1. **Kepala Seksi Tata Pemerintahan**
2. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang melipahkan oleh bupati kepada camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidanng tata pemrintahan.

1. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
2. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perumusa, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. **Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
2. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik ditingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perunndang – undangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramean dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh bupati kepada camat sebagian otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

1. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**
2. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan,pendidikan pengendalian penduduk dan kelurga berencana pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh bupati kepada camat sebagian otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

* 1. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2021. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Rembang**

| **Rancangan Awal RKPD 2022** | **Hasil Analisis Kebutuhan** |
| --- | --- |
| **NO** | **Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcame)/Kegiatan (Output)** | **Satu****An** | **Target Capaian** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif APBD (Rp)** | **Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (Output)** | **Satu****An** | **Target Capaian** | **Lokasi** | **Pagu Indikatif APBD (Rp)** | **Catatan Penting** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **KECAMATAN SALE** | **1.543.720.000** | **KECAMATAN SALE** | **1.543.720.000** |  |
| **A** | **Urusan Umum** | **1.543.720.000** | **Urusan Perencanaan** | **1.543.720.000** |  |
| **I** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | Prosentase ketercapian pelayanan umum, Prosentase ketecukupan sarana dan prasarana kantor, posentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik, prosentase terpenuhinya pelaporan tepat waktu | % | 95  | Sale | 1.085.170.000 | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase ketercapaian pelayanan umum Persentase ketercukupan sarana prasarana aparaturPersentase pemenuhan pelayanan kepegawaianPersentase pemenuhan pelayanan keuangan | % | 95  | Sale | 1.085.170.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | % | 95 | Sale | 238.370.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase ketecukupan sarana dan prasarana kantor |  |  | Sale | 638.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | posentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik | % | 95 | Sale | 101.600.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan | prosentase terpenuhinya pelaporan tepat waktu | % | 95 | Sale | 107.200.000 |  |
| **II** | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  | Prosentase ketercapian perencanaan dan evaluasi kinerja | % | 95  | Sale | 13.800.000 | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Prosentase ketercapian perencanaan dan evaluasi kinerja  | % | 70 | Sale | 13.800.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penusunan dokumen perencanaan kineraja perangkat daerah | Prosentase informasi yang disampaikan kepublik | 3 | dok | Sale | 13.800.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik**  | Persentase Informasi Yang Prosentase informasi yang disampaikan kepublik  | % | 95  | Sale | 3.000.000 | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik**  | Prosentase informasi yang disampaikan kepublik | % | 95  |   Sale | 3.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | Prosentase informasi yang disampaikan kepublik | % | 95 |  Sale | 3.000.000 |  |
| **IV** | **Progaram Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman masyarakat** | Presentase tingkat kinerja seksi pemerintahanPresentase tingkat kinerja seksi pemberdayaan dan pembangunanTingkat seksi kesejahteraan rakyatTingkat seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  | % | 95 | Sale | 441.750.000 | **Progaram Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman masyarakat** | Presentase tingkat kinerja seksi pemerintahanPresentase tingkat kinerja seksi pemberdayaan dan pembangunanTingkat seksi kesejahteraan rakyatTingkat seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  | % | 777 |  Sale | 441.750.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi penyelenggaran pemerintahan desa/ kelurahan | Prosentase Pemerintahan Desa yang/kelurahan yang tertib administrasi.  | % | 95 |  Sale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa | Prosentase Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola. | % | 95 |  Sale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi peningkatan kesejahteraan Masyarakat | Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa/keluarahan yang aktif | % | 95 |  Sale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3 ( Ketertiban,Ketentraman,keindahan) | % | 95 | Sale |  |  |

Secara umum,rancangan awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2022 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan BAPPEDA pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terajdi dinamika perubahan progam dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhdap kebijakann atau regualsi yang baru yaitu Permendagri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodevikas,noemenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahsan kebijakan umum anggraan ( KUA) dan prioritas dan plafón anggran ( PPAS ) pada sisi legislatif, dimanan program dan kegaitan perlu mengakomodir aaspirasi dari masyarakat.

**Tabel 2.8**

**Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan**

**Tahun 2022 Pemerintah Kabuapaten Rembang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Keterangan Kecamatan Sale tidak ada dana POKIR dari DPR.**

**BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN**

**3.1 Tujuan dan sasaran Renja**

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan,mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis.Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meliputi bidang pemerintahan,pembangunan,kesejahteraan sosial ,ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan public;
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sebagai upaya mendorong provesionalisme;
4. Meningkatkan Jaminan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat;
6. Tertib Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Meningkatkan fungsi pemerintahan desa/kelurahan.

Setiap sasaran strategis Kecamatan Sale dijabarkan lebih lanjut kedalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud tujuan dan karakteristik-karakteristik program.

Adapun sasaran yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Masyarakat penerima pelayanan;
2. Sarana pelayanan public;
3. Rumah Dinas, gedung kantor, kendaraan operasional roda 4 dan roda 2;
4. Aparatur Kecamatan Desa/Kelurahan;
5. PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan.

**3.2 Program dan kegiatan**

Tahun 2021 adalah tahun ke lima Renstra Kabupaten Rembang periode 2016-2021. RENJA Kecamatan Sale ,Kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan PKPD tahun 2022 secara rinci rumusan program dan kegiatan kecamatan Sale,Kabupaten Rembang 2022 dan prakiraan maju tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Urusan/Bidan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan**  | **Indikator Capaiana Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)**  | **Satuan** | **Target Capaian** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
|  | **URUSAN UMUM** |  |  |  |
| I | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | % Ketercapaian Pelayanan Umum | % | 95 |
|  |  | % Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian | % |  |
|  |  | % Pemenuhan Pelayanan keuangan | % |  |
|  |  | % Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | % |  |
| 1 | Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | % Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 95 |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Dokumen Pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik | Dokumen  | 3 |
| 3 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Dokumen menejemen kepegawaian yang dikelola dengan baik | Dokumen | 3 |
| 4 | Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Keuangan | % Terpenuhinya pelaporan tepat waktu/ dengan kualitas baik | Dokumen | 3 |
| **II** | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah** | % Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | %. | 70 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah yang disusun. | Dokumen | 3 |
| 2 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah | Jumlah evaluasi laporan kinerja yang disusun. | Dokumen | 2 |
| **III** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | % Informasi yang disampaiak ke Publik | % | 95 |
| 1 | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik | informasi | 4 |
| **IV** | **Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan ,Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketenteraman masyarakat** | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/kelurahan | Nilai | 7 |
|  |  | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Nilai | 7 |
|  |  | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat | Nilai | 7 |
|  |  | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. | Nilai | 7 |
| 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Keluarahan | % Pemerintahan desa yang tertib Administrasi | % | 95 |
|  |  | % Pemerintah desa yang Lunas bayar PBB |  |  |
| 2 | Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Desa | % Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola | % | 95 |
|  |  | % Penetapan APBDes tepat Waktu |  |  |
| 3 | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | % Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa/keluarahan yang aktif | % | 95 |
| 4 | Pembinaan Ketentramana dan Ketertiban Masyarakat | % Penyelesaian Permasalahan K3. | % | 95 |

**Tabel 3.2**

**Persandingan Rencana Strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Lama dan Baru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RENSTRA BARU** | **RENSTRA LAMA** |
| **No** | **PROGRAM** |  | **KEGIATAN** | **PROGRAM** |  | **KEGIATAN** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | % Ketercapaian Pelayanan Umum, % ketecukupan sarana dan prasarana kantor, posentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik, prosentase terpenuhinya pelaporan tepat waktu |  | **Menejemen Administrasi pelayanan Umum dan kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah** | % Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, % Pemenuhan Pelayanan keuangan, |  |
|  | **Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum** |  | 1. Pelayanan PATEN
 |  |  | 1. Fasilitasi PATEN
 |
|  |  |  | 1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat
 |  |  | 2. Pelayanan Jasa Surat menyurat. |
|  |  |  | 1. Penyediaan jasa Komonikasi,Sumber

 Daya Air dan Listrik |  |  | 3. Penyediaan jasa Komonikasi sumber daya air dan listrik |
|  |  |  | 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 |  |  | 4. Belanja Alat Tulis kantor |
|  |  |  | 1. Penyediaan Barang Cetakan dan

 Penggandaan |  |  | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. |
|  |  |  | 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan

 Peraturan Perundang-  undangan |  |  | 6. Penyediaan Bahan bacaan Danperundang undangan. |
|  |  |  | 1. Penyediaan Makanan dan minuman
 |  |  | 7. Penyediaan makanan dan Minuman Rapat. |
|  |  |  | 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah
 |  |  | 8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah. |
|  |  |  | 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
 |  |  | 9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah. |
|  |  |  | 1. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 |  |  | 10. ..Pelaksanaan Hari besar Kenegaraan |
|  |  |  | 1. Fasilitasi kegiatan hari kewanitaan
 |  |  | 11. Pelaksanaan Hari kewanitaan. |
|  | **Peningkatan sarana dan prasarana aparatur** |  | 1. Pengadaan peralatan kantor
 | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | 1. Pengadaan peralatan kantor
 |
|  |  |  | 1. Pengadaan perlengkapan rumah tangga
 |  |  | 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga.
 |
|  |  |  | 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 |  |  | 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 |
|  |  |  | 1. Penyediaan peralatan rumah tangga
 |  |  | 1. Penyediaan peralatan Rumah tangga.
 |
|  |  |  | 1. Penyediaan jasa administrasi kantor/ kebersihan
 |  |  | 1. Penyediaan jasa Administrasi kantor/kebersihan
 |
|  |  |  | 1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
 |  |  | 1. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas.
 |
|  |  |  | 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 |  |  | 1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor.
 |
|  |  |  | 1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 |  |  | 8. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
|  |  |  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan
 |  |  | 9. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung pertemuan |
|  |  |  | 1. Pemeliharaan rutin/berkala tempat ibadah
 |  |  | 10. Pemeliharaan rutin /berkala rumah ibadah |
|  |  |  | 1. Penataan wajah kota kecamatan sale
 |  |  | 11. Penataan Wajah Kota Kecamatan Sale. |
|  | **Peningkatan kualitas sumber daya aparatur** |  | 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 | **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** |  | 1. Pengadaan Pakian Khusus hari hari tertentu.
 |
|  |  |  | 1. Honorarium admin sipandu
 |  |  | 1. Honor Admin Sipandu.
 |
|  |  |  | 1. Honorarium admin pinger print
 |  |  | 1. Honor Admin Prinjer Print
 |
|  | **Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan** |  | 1. Penyususnan LKPD/ Laporan Akhir Tahun
 | **Peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan** |  | 1. Penyusunan LKPD/laporan Akhir Tahun
 |
|  |  |  | 1. Penyususnan Dokumen RKA/DPA
 |  |  | 1. Penyusunan Dokumen RKA/DPA
 |
|  |  |  | 1. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
 |  |  | 1. Penyusunan jasa Administrasi Keuangan
 |
|  | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah** | Prosentase ketercapian perencanaan dan evaluasi kinerja | 1. Penyususnan Renja OPD
 | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | % Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Renja OPD
 |
|  |  |  | 1. Penyususnan Laporan capaian Renja Triwulan
 |  |  | 1. Penyusunan Laporan Capaia Renja Triwulanan
 |
|  |  |  | 1. Penyususnan LKJIP
 |  |  | 1. Penyusunan LKJiP
 |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK** | Prosentase informasi yang disampaikan kepublik | 1. Honorarium Pengelolaan Website
 | **Peningkatan keterbukaan Informasi Publik** | % Informasi yang disampaiak ke Publik | 1. Honor Pengelola Wibe Sibe
 |
|  | **Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeriintahan Desa/Kelurahan** | Prosentase Pemerintahan Desa yang/kelurahan yang tertib administrasi. | 1. Pembinaan perangkat desa | **Peningkatan Kinerja Pemerintahan,pembangunan,Pembinaan kemasyarakatan dan Ketentraman ketertiban.** | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/kelurahan, Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. | 1. Pembinaan Perangkat desa.
 |
|  |  |  | 1. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 |  |  | 1. Fasilitasi Pengelolaan Inventaris Desa.
 |
|  | **Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa** | Prosentase Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola. | 1. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan APBDesa
 |  |  | 1. Pembinaan dan Pengawasan APBDes
 |
|  |  |  | 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 |  |  | 1. Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.
 |
|  |  |  | 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 |  |  | 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kec.
 |
|  | **Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa** | Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa/keluarahan yang aktif | 1. Fasilitasi PKK
 |  |  | 6. Pembinaan Kesjahteraan  Keluarga ( PKK ) |
|  |  |  | 1. Fasilitasi Kegiatan MTQ/STQ/FASI
 |  |  | 7. Fasilitasi MTQ/STQ/FASI |
|  |  |  | 1. Pelayanan Ibadah Haji
 |  |  | 8. Pelayanan Ibadah haji |
|  |  |  | 1. Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan
 |  |  | 9. Fasilitasi Kegiatan Bulan Romandhon |
|  |  |  | 1. Validasi Desa Miskin Tk Kecamatan
 |  |  | 10. Validasi Data MiskinTingkat Kecamatan |
|  |  |  | 1. Kegiatan FKPA
 |  |  | 11. Perlindungan anak |
|  |  |  | 1. Fasilitasi PKH Kecamatan
 |  |  | 12. Fasilitasi Program PKH |
|  |  |  | 1. Pengutan Pokjanal Posyandu Desa
 |  |  | 13. Falidasi Pokjanal Kecamatan sehat |
|  |  |  | 1. Fasilitasi PAUD
 |  |  | 14. Fasilitasi Pendidikkarakter anak usia Dini |
|  |  |  | 1. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tk Kecamatan
 |  |  | 15. Pembedayaan Organisasi Kepemudaan Tk kec |
|  |  |  | 1. Fasilitasi kegiatan Olahraga
 |  |  | 16. Fasilitasi FORKOMPINKA |
|  |  |  | 1. Fasilitasi GAKY
 |  |  | 17. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas |
|  | **Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat** | Prosentase Penyelesaian Permasalahan K3 ( Ketertiban,Ketentraman,keindahan) | 1. FORKOMPINCAM
 |  |  | 18. Sosialisasi penanggulangan bencana |
|  |  |  | 1. Pembinaan Anggota Hansip/ Linmas
 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Sosialisasi Penanggulan Bencana Tk Kecamatan
 |  |  |  |

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SALE**

**TAHUN 2022 (PROGRAM 2021)**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
10. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
12. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
13. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
14. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
16. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

 Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kecamatan Sale Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program dan 11 kegiatan merupakan satu kesatuan dalam urusan umum. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.600.900.000Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**BAB V
PENUTUP**

 Rencana Kerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi,misi dan program kegiatan Kantor Kecamatan Sale dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang,yang dalam penyusunannya mengacu pada rencana strategis Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022-2027.

Rencana Kerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2022. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman dan kaidah pelaksanaannya.

**Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara *jujur, konsisten, transparan*.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Sale dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2022.

Sale, tanggal Desember 2020

CAMAT SALE

Drs.SUBHAN

 Pembina Tk.I

 NIP.1966112419920310005